

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu hubungan diplomatik Turki bersama Israel memunculkan banyak perdebatan dan kecaman dari negara-negara Islam, khususnya negara-negara Arab (Akbar, 2017). Hal ini tentu tidak terlepas dari fakta bahwa negara Israel telah melakukan penyerangan-penyerangan terhadap warga Palestina sejak terjadinya Perang Enam Hari pada tahun 1967 yang mendorong dilakukannya pendudukan Israel di wilayah Palestina hingga saat ini. Hubungan diplomatik Turki yang terjalin sejak tahun 1950 bersama Israel telah mendorong munculnya beberapa kesepakatan kerjasama di berbagai bidang, seperti: militer, ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, dan lain sebagainya.

Terjalannya hubungan diplomatik antara Turki dan Israel telah mengalami dinamika yang dapat dikatakan tidak selalu menunjukkan kestabilannya, terlebih dalam kaitannya dengan isu konflik Israel-Palestina. Hal ini dikarenakan ketika membahas mengenai hubungan diplomatik antara Turki dan Israel maka sulit untuk melepaskannya dari isu Palestina. Dalam hal ini, Turki selain memainkan peran sebagai aktor negara yang menjalin hubungan diplomatik bersama Israel turut memberikan dan menunjukkan dukungan-dukungan yang terus bergulir untuk Palestina hingga saat ini yang kemudian mendorong Turki untuk ikut terlibat dalam dalam menengahi konflik Israel Palestina. Dimulai sejak tahun 1967 disaat Turki bersama negara-negara Arab lainnya mengutuk dan menyerukan kepada militer Israel untuk mundur dari wilayah teritorial Palestina atas terjadinya Perang Enam Hari antara Israel dan Palestina, pengakuan Turki atas eksistensi PLO (*Palestinian Liberation Organization*) tahun 1975, kontribusi Turki untuk terlibat pada Konferensi Madrid pada tahun 1991 yang dilanjutkan dengan Kesepakatan Oslo pada tahun 1993, hingga saat ini di bawah Pemerintahan AKP dan Erdoğan.

Pada tahun 2002, keterlibatan Turki di bawah Pemerintahan AKP (*Adalet Ve Kalkinma Partisi*) di dalam konflik Israel dan Palestina mulai terlihat ketika PM Turki, Ismail Cem bersama Menteri Luar Negeri Yunani, George A. Papandreou mengunjungi Palestina dan Israel untuk memainkan perannya sebagai

komunikator paska terjadinya insiden Al-Aqsa Intifada (Ertosun, 2016). Selanjutnya, PM Erdoğan kembali melanjutkan inisiatifnya untuk terlibat di dalam konflik Israel dan Palestina atas kunjungannya ke Israel pada tahun 2005 dengan menyatakan, “*Turkey is interested in helping to find a solution to the conflict. Abu Mazen¹ has brought hope and change to the region and must be strengthened*” (Alsaftawi, 2017). Kemenangan Hamas pada pemilihan umum tahun 2006 menjadi titik balik lain yang diambil Turki untuk ikut terlibat di dalam konflik. Ketika negara-negara lain menolak untuk mengakui kemenangan Hamas pada pemilihan umum 2006, Turki menjadi satu-satunya negara yang justru mengakui kemenangan Hamas atas pemilihan umum yang telah dilakukan secara sah dan menerima kunjungan Khaled Meshal sebagai salah satu perwakilan Hamas atas kunjungannya ke Ankara pada tahun yang sama (Ertosun, 2016).

Keterlibatan Turki pada konflik Israel dan Palestina turut tercermin ketika Turki menjadi fasilitator dalam memfasilitasi mekanisme dialog perdamaian antara Palestina, Israel, dan Turki yang disebut dengan *Ankara Forum for Economic Cooperation Between Palestine, Israel, and Turkey* pada tahun 2007 (Bayraktar, 2019). Tidak berhenti sampai disitu, Turki turut menunjukkan perhatian lain di dalam konflik Israel dan Palestina dengan menunjukkan arah kebijakan luar negerinya yang lebih tegas atau antagonistik dalam menyuarakkan aksi-aksi kekerasan pada konflik tersebut. Hal ini terlihat atas adanya penyerangan Operasi *Cast Lead* dimana Turki mengecam tindakan-tindakan kekerasan Israel kepada Palestina. Niat Turki yang ingin terlibat di dalam konflik Israel dan Palestina kembali dilanjutkan melalui Konferensi Ekonomi Dunia (*Davos World Economic Forum*) pada tahun 2009 dengan mengecam tindakan Israel atas aksi penyerangan pada operasi *Cast Lead* yang terjadi sebelumnya dengan mengatakan, “*I find it very sad that people applaud what you said. There have been many people killed. And I think it is very wrong and it is not humanitarian.*” (Al Jazeera, 2009).

Keterlibatan Turki pada konflik Israel dan Palestina semakin terlihat ketika Turki melalui organisasi non-pemerintahnya, *Ihsani Yardim Vakfi* (IHH) melakukan kerjasama dengan *Freedom Flotilla* dalam melakukan misinya untuk

¹ Kunya Abu Mazen merupakan nama lain dari Mahmoud Abbas yang menjabat sebagai Presiden Palestina dan Otoritas Nasional Palestina pada periode pertama kala itu

memecahkan blokade Israel di Jalur Gaza dan meningkatkan kesadaran negara-negara di dunia internasional atas adanya isu Palestina melalui perjalanan pelayaran dengan menggunakan 6 kapal pada Mei 2010 (Ibrahim & Nor, 2019). Namun, upaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan tersebut akhirnya gagal untuk dilakukan atas adanya aksi penyerangan oleh *Israel Defense Force* (IDF) terhadap kapal Mavi Marmara yang masih berada pada posisi perairan internasional dan menyebabkan 9 aktivis politik pro-Palestina tewas (Syahrul, 2017). Dalam merespon penyerangan tersebut, Turki kemudian memutuskan hubungan diplomatiknya bersama Israel yang diikuti dengan penarikan masing-masing duta besar dari masing-masing negara tujuan serta dibekukannya beberapa kerjasama yang dimiliki oleh kedua negara dalam bidang militer, pertahanan, ekonomi, maupun pariwisata. Selain itu, Turki turut memberikan tiga tuntutan utama terhadap otoritas Israel yang salah satunya menuntut diperbolehkannya bantuan kemanusiaan Turki yang ditujukan kepada Palestina untuk masuk ke Jalur Gaza oleh Israel (Myers, 2017). Atas adanya tuntutan tersebut yang diikuti dengan berbagai keterlibatan Turki pada konflik Israel dan Palestina sebelumnya tentu memberikan indikasi adanya komitmen Turki yang ingin ikut terlibat dan berkontribusi dalam konflik panjang Israel dan Palestina.

Kebanyakan penelitian yang telah penulis temukan mendasarkan analisisnya pada pendekatan realis yang menekankan pada konsep kepentingan nasional. Contohnya saja, Ahmad Syahrul (2017) dalam penelitiannya yang membahas mengenai, “Normalisasi Hubungan Turki dengan Israel Paska Tragedi Mavi Marmara 2016” menekankan adanya faktor kepentingan nasional sebagai acuan paradigma dalam mengetahui alasan kesediaan Turki melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel. Senada dengan hal tersebut, Andraina Ary Fericandra (2016) dalam penelitiannya turut menghadirkan konsep kepentingan nasional yang lebih khusus merujuk kepada kepentingan ekonomi Turki terhadap Israel di bawah pemerintahan AKP dan Erdoğan. Andraina juga mengatakan bahwa pemulihan hubungan diplomatik Turki dengan Israel didukung oleh fakta bahwa Turki lebih mengedepankan faktor material dalam bidang investasi, perdagangan, ekonomi, dan pariwisata yang menguntungkan pemasukan GDP di dalam negaranya.

Penelitian ini bermaksud menjelaskan kecenderungan Turki yang berkomitmen melakukan perdamaian pada konflik Israel Palestina dan berupaya terlibat dalam misi-misi perdamaian dengan menggunakan perspektif konstruktivis yang secara khusus mengacu kepada Identitas Peran. Konsep Identitas Peran yang dimiliki Turki sebagai *peacemaker* akan mempengaruhi kepentingan yang ingin diraihinya di dalam Kebijakan Luar Negerinya. Arah kebijakan Luar Negeri Turki akan berpedoman pada identitas peran Turki sebagai *peacemaker* di kawasan.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam proposal ini, penulis berusaha untuk menjawab pertanyaan mengenai **Mengapa Turki memiliki komitmen dalam perwujudan pada perdamaian konflik Israel dan Palestina?**

1.3 Kerangka Pemikiran

Konsep Identitas Peran dalam Konstruktivisme

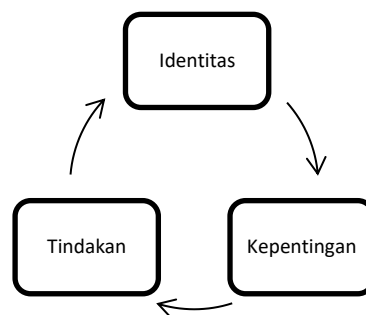
Berdasarkan namanya, konstruktivisme merupakan hasil dari konstruksi (*construct*) sosial. Teori konstruktivis memandang segala sesuatu bukan sebagai sesuatu yang telah ada atau *given* namun merupakan sesuatu yang ada atau hadir dikarenakan suatu hal tersebut diciptakan maupun dibentuk atau yang dikenal dengan istilah "*socially constructed*." Fred Chernoff (2008) dalam bukunya, "*Theory and Metatheory in International Relations*" menjelaskan konsepsi *socially constructed* dalam perspektif konstruktivisme sebagai suatu cara manusia dalam berpikir dan berinteraksi dengan satu sama lain. Dalam peranannya, segala sesuatu yang terkonstruksi secara sosial tersebut berasal dari pemaknaan yang disematkan oleh aktor terhadap suatu objek tertentu sehingga objek tersebut kemudian memiliki makna di dalamnya. Dengan kata lain, konstruktivis memandang berharga atau tidaknya suatu benda dipengaruhi oleh disematkannya makna (pemaknaan) oleh aktor yang memandang benda tersebut. Pemaknaan akan suatu hal tidak tercipta hanya dari individu tunggal namun tercipta dari adanya persepsi antara individu satu dengan individu lainnya yang membentuk interaksi sosial atau dikenal sebagai realitas intersubjektif.

Teori Konstruktivis merupakan teori yang menekankan pada aspek gagasan atau ide dari suatu objek. Gagasan dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk memproduksi makna intersubjektif yang kemudian membentuk struktur hubungan internasional dan identitas aktor (Hodf, 1998). Gagasan yang terbentuk dari individu maupun negara mampu mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan oleh aktor tersebut. Artinya, tindakan individu maupun negara merupakan efek atau hasil dari dibentuknya gagasan. Konstruktivisme memandang bahwa suatu hal yang terjadi merupakan hasil dari gagasan yang dibentuknya. Kaum konstruktivis juga berpendapat bahwa dimensi gagasan lebih penting daripada dimensi material, karena identitas dan kepentingan ditentukan oleh gagasan daripada kenyataan yang apa adanya (Wendt, 1999).

Dikarenakan konstruktivisme memandang segala sesuatu sebagai suatu hal yang terkonstruksi secara sosial maka konsep anarki, kepentingan nasional, maupun kekuasaan di dalam hubungan internasional juga dipandang sebagai sesuatu yang diciptakan dan dikonstruksi secara sosial melalui pemaknaan dari aktor-aktor internasional maupun terbentuknya suatu gagasan.

Di dalam perspektif konstruktivisme, terdapat beberapa konsep yang masuk di dalam cakupan pembahasannya, salah satunya yaitu identitas. Alexander Wendt (1999) dalam bukunya yang berjudul *Social Theory of International Politics* mengartikan konsep identitas secara sederhana sebagai atribut yang melekat pada diri aktor yang dapat mendorong tindakan. Dalam peranannya, konsep identitas digunakan sebagai suatu atribut untuk membedakan “*self*” dan “*others*” serta menekankan pada istilah “*who we are*” yang merujuk kepada status, peran, maupun posisi suatu negara di dalam hubungan internasional (Wendt A., 1999). Secara lebih lanjut, Peter Katzenstein (1996: 11-12) dalam *Introduction: Alternative Perspectives on National Security* turut menjelaskan identitas suatu negara sebagai salah satu aktor internasional muncul akibat adanya interaksi timbal balik dengan lingkungan sosial yang berbeda-beda, baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

Identitas menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam tindakan aktor internasional dalam komunitas internasional. Hal ini yang menjadikan Identitas memainkan peranan yang penting sebagai basis dasar dalam menentukan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun negara. Hal tersebut kemudian dipertegas kembali oleh Katzenstein yang menganggap Identitas suatu aktor internasional sangatlah penting untuk memahami perilaku politiknya (Hemmer & Katzenstein, 2002). Konsep identitas di dalam konstruktivisme memiliki peran sebagai *independent variable* yang akan menentukan kepentingan nasional sebagai tujuan yang ingin diraih oleh suatu negara yang tercakup dalam Kebijakan Luar Negeri yang bertindak sebagai *dependent variable*. Arah kebijakan luar negeri suatu negara dalam meraih kepentingan nasionalnya sebagai tujuan yang ingin diraihnya bukan merupakan suatu hal yang telah *given* namun justru dibentuk berdasarkan definisi identitas yang dimiliki oleh suatu negara. Artinya, perilaku negara sebagai aktor internasional dalam bertindak ataupun merespon negara lain di dalam hubungan internasional akan didasarkan pada kepentingan atau tujuan yang hendak dicapai oleh negara tersebut dimana kepentingan tersebut juga didorong oleh adanya pemaknaan identitas diri negara di dalam hubungan internasional yang berimplikasi pada tindakan apa yang akan dilakukannya. Dalam memahami hal tersebut, Mohamad Rosyidin (2015) dalam bukunya yang berjudul “*The Power of Ideas*” memberikan gambaran sederhana konsep identitas yang dapat mempengaruhi tindakan aktor menjadi suatu siklus berikut ini.



Gambar 1.1 Identitas, Kepentingan, dan Tindakan

Sumber: Mohamad Rosyidin. (2015). *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*, h. 49.

Pada dasarnya, pola interaksi suatu negara di dalam hubungan internasional menurut konsep identitas dalam perspektif Konstruktivisme secara

garis besar dapat dipahami sebagai suatu siklus. Konsep identitas diri yang dipahami oleh suatu aktor akan berpengaruh terhadap bagaimana aktor tersebut akan bertindak sementara tindakan tersebut akan didasarkan pada kepentingan atau tujuan yang hendak dicapai oleh aktor tersebut (Rosyidin, 2015: 48). Sama halnya dengan aktor negara di dalam hubungan internasional, negara dalam bertindak ataupun merespon negara lain di dalam hubungan internasional akan didasarkan pada kepentingan atau tujuan yang hendak dicapai oleh negara tersebut dimana kepentingan tersebut juga didorong oleh adanya pemaknaan identitas diri negara di dalam hubungan internasional yang berimplikasi pada tindakan apa yang akan dilakukannya.

Dalam peranannya, Alexander Wendt (1999: 224-229) dalam bukunya yang berjudul *Social Theory of International Politics* membagi identitas menjadi empat jenis, yaitu: (i) Identitas korporat yang merujuk kepada suatu karakteristik fisik yang dimiliki oleh suatu negara; (ii) Identitas Tipe yang mendasarkan pada suatu *value* atau sistem yang diadopsi oleh suatu negara; (iii) Identitas Peran yang berkaitan dengan posisi, kedudukan, maupun tanggung jawab suatu negara di dalam hubungan internasional; dan (iv) Identitas kolektif yang menekankan pada kesamaan identitas.

Dalam kaitannya dengan topik penelitian ini, peneliti akan mengaplikasikan konsep identitas peran dalam perspektif konstruktivisme dalam menjawab rumusan masalah terkait alasan Turki yang berkomitmen mewujudkan perdamaian pada konflik Israel dan Palestina. Dalam hal ini, peneliti akan mengangkat identitas peran Turki sebagai negara *peacemaker* yang berupaya menjaga perdamaian di kawasan yang dikhususkan di kawasan Timur Tengah di bawah Pemerintahan AKP dan Erdoğan yang menunjukkan perilaku lebih tegas dan terbuka dibanding pada periode Pemerintahan sebelumnya. Identitas Turki sebagai *peacemaker* menjadi basis dasar dalam menentukan kepentingan nasional Turki yang diwujudkan melalui kebijakan luar negerinya. Arah kebijakan luar negeri Turki yang berpedoman pada identitas peran Turki sebagai *peacemaker* telah ditunjukkannya melalui peran Turki sebagai mediator tidak langsung dalam menyelesaikan beberapa permasalahan konflik antar negara di bawah Pemerintahan AKP dan Erdoğan, seperti: memediasi pembicaraan tidak langsung

antara Suriah dan Israel pada tahun 2008, Suriah dan Iraq pada tahun 2009, dan upaya penyelesaian konflik antara Armenia dan Azerbaijan melalui Minsk Group (Hardiyan, 2014). Selain itu, penolakan Turki terhadap permintaan Amerika Serikat untuk mengirimkan pasukan tentara Amerika Serikat melalui Turki untuk menyerang Irak pada tahun 2003 serta meningkatnya hubungan Turki bersama negara Suriah, Qatar, dan Arab Saudi (Hardiyan, 2014) menjadi beberapa bukti arah kebijakan luar negeri Turki yang berpedoman pada identitas peran Turki sebagai *peacemaker* yang melekat pada negaranya.

1.4 Hipotesis

Penelitian ini berhipotesis bahwa komitmen Turki untuk mewujudkan perdamaian di dalam konflik Israel dan Palestina di bawah Pemerintahan AKP didasarkan pada konsep identitas peran yang dimiliki Turki sebagai *peacemaker*. Turki di bawah Pemerintah AKP berupaya untuk terus berkontribusi dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina melalui perannya sebagai komunikator maupun fasilitator secara damai. Artinya, komitmen Turki untuk mewujudkan perdamaian di dalam konflik Israel dan Palestina di bawah Pemerintahan AKP hingga saat ini didasarkan atas keinginan Turki untuk terus berupaya membentuk stabilitas dan perdamaian yang menekankan pada penggunaan cara cara diplomasi melalui perannya sebagai komuikator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina secara damai yang sesuai dengan identitas peran *peacemaker* yang dimilikinya.

1.5 Metodologi Penelitian

Pada tulisan ini, penulis menerapkan *reseacrh design* kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terkait alasan Turki yang berkomitmen dalam perwujudan perdamaian pada konflik Israel dan Palestina. Dalam upayanya memberikan pemahaman lebih lanjut terkait komitmen Turki pada perdamaian konflik Israel dan Palestina maka penulis berupaya mengumpulkan data-data sebagai bukti dengan menggunakan cara *literature research* atau studi kepustakaan. Penulis akan memperoleh data-data studi kepustakaan melalui buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, makalah, laporan

penelitian, media cetak, surat kabar, maupun website milik pemerintah, universitas, maupun organisasi yang terkait dengan topik penelitian.

Selain itu, teknik analisis data yang digunakan dalam menginterpretasi atau menafsirkan data akan menggunakan metode kongruen atau *congruence method* yang telah umum digunakan bagi *reasearch design* yang bersifat kualitatif. Teknik analisis data yang berdasarkan pada *congruence method* mengacu kepada konsistensi, penyelarasan, dan penyesuaian data yang relevan dengan teori. Artinya, teori digunakan untuk memisahkan data agar relevan dengan teori yang digunakan. Hal ini selaras dengan tujuan dari metode kongruen yang berupaya untuk mencari konsistensi antara kasus dan prediksi yang didasarkan pada teori tertentu yang digunakan (Benett, 2005). Dalam kaitannya dengan kasus yang diangkat maka penulis akan menganalisis data-data dengan melakukan interpretasi data, menafsirkan data sehingga data tidak disajikan secara ‘mentah’, kemudian mensortir data yang di dalamnya terdapat proses mereduksi data dimana hanya beberapa data yang akan disajikan yang dirasa relevan dengan konsep identitas peran dalam perspektif konstruktivisme. Secara singkat, metode kongruen mencoba mencocokkan dan menyelaraskan bukti-bukti data dengan asumsi teori yang digunakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Penelitian ini akan terbagi menjadi empat bab, yaitu:

BAB I: merupakan bab pendahuluan sebagai pondasi utama penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II: merupakan bab pembahasan yang akan memberikan gambaran mengenai gambaran konflik Isral dan Palestina secara umum, dinamika hubungan diplomatik antara Turki dan Israel dengan memberikan gambaran awal terjalannya hubungan diplomatik di antara kedua negara pada awal pembentukannya hingga saat ini pada pemerintahan AKP dan Erdoğan, serta peran Turki di dalam konflik Israel dan Palestina.

BAB III: merupakan bab analisis yang akan menjawab rumusan masalah terkait alasan Turki yang berkomitmen dalam perwujudan perdamaian pada

konflik Israel dan Palestina berdasarkan pada acuan konsep identitas peran dalam perspektif konstruktivisme.

BAB IV: merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai temuan-temuan penelitian beserta kekurangan-kekurangan dalam penelitian. Temuan penelitian yang disajikan akan memberikan hasil mengenai apakah temuan penelitian bersifat konsisten dengan hipotesis awal yang telah disajikan atau justru berkontradiksi.

